



ISTIMEWA

**KUNJUNGAN LAPANGAN:** Anggota Pansus Krisnadi Setyawan (belakang dua dari kiri) mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIJ Sri Nurkyatsiwe saat berada di Teras Malioboro 1.

## Ada 30 Pedagang Dapat Lapak secara Tidak Baik

TIGA hari menjelang tutup tahun, panitia khusus (pansus) pengawasan yang dibentuk DPRD Kota Jogja merampung-

kan kerjanya. Pansus itu bertajuk Pengawasan Validasi Pedagang Teras Malioboro 2 ■

*Baca Ada... Hal 7*

# Ada 30 Pedagang Dapat Lapak secara Tidak Baik

Sambungan dari hal 1

Laporan disampaikan di depan rapat paripurna DPRD Kota Jogja pada Kamis 28 Desember 2023 malam.

Laporan pansus terbagi menjadi dua hal. Catatan dan rekomendasi. Dalam rekomendasi pansus menegaskan, data 1041 lapak dan 1092 pedagang di Teras Malioboro 2 sebagai acuan kebijakan akhir dari Pemkot Jogja.

"Itu merupakan kesepakatan pansus dengan pemkot setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari pedagang Teras Malioboro 2," ucap Ketua Pansus Nurcahyo Nugroho saat melaporkan kesimpulan pansus.

Dalam catatannya pansus menilai belum ada kejelasan sosialisasi dari Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ terkait kepastian relokasi pedagang Teras Malioboro 2 ke tempat permanen. Didampingi UPT Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja mengadakan validasi.

Hasilnya, ditetapkan ada sejumlah 1041 lapak. Detailnya, sebanyak 923 lapak dari Paguyuban Tri Dharma, 67 lapak dari Paguyuban Lesehan

dan 51 lapak milik Pedagang Titik Nol. Dari 1041 lapak itu ditempati 1092 pedagang. "Itu karena 51 lapak Pedagang Titik Nol ditempati 102 pedagang," terang Nurcahyo.

Validasi dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama pada 14 November 2023. Kedua, 6 dan 7 Desember serta ketiga 14 dan 15 Desember 2023. Dari hasil validasi itu, pengurus baru Paguyuban Tri Dharma menyampaikan keberatan. Ada indikasi sejumlah 30 pedagang bukan pedagang selasar Malioboro.

"Mereka tiba-tiba mendapatkan lapak di Teras Malioboro 2 sehingga dikategorikan mendapatkan lapak dengan cara tidak baik," imbuh Anggota Pansus Krisnadi Setyawan. Pansus kemudian mengundang pengurus lama Paguyuban Tri Dharma. Tiga kali diundang yang hadir ke gedung parlemen. Pansus juga berupaya mempertemukan pengurus lama Paguyuban Tri Dharma dengan 30 pedagang yang diindikasikan lapak dengan cara tidak baik.

Di sisi lain, lanjut Krisnadi, pansus juga mendapatkan

data 58 dari pengurus lama Paguyuban Tri Dharma tentang data pembanding atas 30 pedagang tersebut. Pansus juga mendapatkan data adanya tujuh pedagang yang tercecer belum mendapatkan lapak. Mereka sebelumnya berdagang di dekat TIC Malioboro. Kejadian senada dialami delapan pedagang dari Paguyuban Tri Dharma.

Dari komunikasi dengan pedagang Teras Malioboro 2 mengeluhkan pedagang-pedagang di sirip Malioboro, toko-toko Malioboro dan penjual makanan keliling serta asongan yang menjual barang dagangan serupa. Dampaknya pengunjung atau wisatawan tidak lagi tertarik berbelanja ke Teras Malioboro 2. "Pansus meminta pemkot bertindak tegas," desak Krisnadi.

Selanjutnya, pansus mengusulkan kepada Pemprov DIJ dalam relokasi permanen, satu pedagang bisa mendapatkan satu lapak. Proses penempatan pedagang dilihat dari produk dagangan yang sama bukan dari paguyuban mereka berasal.

Terkait berbagai temuan menyangkut data pedagang,

pansus merekomendasikan 11 lapak sebagai tanda jasa pengurus tidak diikutkan dalam relokasi permanen. Juga lima pedagang yang tidak berjualan di selasar Malioboro tidak dilibatkan saat relokasi permanen. "Terhadap 14 pedagang yang benar-benar berjualan di selasar Malioboro namun tidak tergabung dalam kelompok pedagang selasar Malioboro tetap diikutkan dalam relokasi permanen," tegas Krisnadi. Begitu juga bagi 15 pedagang yang tercecer tetap harus diikutkan dalam pendataan relokasi dan melengkapi berkas sesuai aturan.

"Perlu ada kebijakan afirmatif bagi ahli waris pedagang yang meninggal dunia. Jumlahnya ada 38 orang yang semuanya anggota Paguyuban Tri Dharma," terang wakil ketua Komisi D DPRD Kota Jogja ini.

Di bagian akhir dari laporan itu, pansus meminta Dinas Kebudayaan Kota Jogja dan UPT Pengelolaan Cagar Budaya agar lebih komunikatif dan transparan terhadap para pihak terkait kebijakan di Teras Malioboro 2. (kus/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005